

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan, yang menjadi penjelasan dasar dilaksanakannya studi mengenai **Aplikasi Wilayah Manajemen Kebakaran dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Meminimalkan Potensi Kebakaran di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.**

### 1.1 Latar Belakang

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik." (QS. 7 : 56)*

Al Qur'an Surat Al-'A`rāf ayat 56 mengandung makna pentingnya upaya memelihara, memakmurkan, dan melestarikan lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia. Allah memerintahkan umat manusia untuk selalu berdo'a dengan penuh rasa takut dan harapan kepada-Nya, didalam setiap kegiatan yang ditempuh oleh umat manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dalam sebuah kesatuan lingkungan hidup, tempat tinggal merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan hidup. Walaupun lingkungan terus mengalami perubahan, tetapi kondisinya harus mampu untuk menopang secara terus-menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan manusia dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Tempat tinggal yang aman dari berbagai potensi bencana, adalah impian untuk seluruh manusia. Bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, ataupun kebakaran masih meresahkan sebagian masyarakat Indonesia.

Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Berdasarkan penyebabnya, bencana kebakaran dapat

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu faktor alami, akibat ulah manusia, atau kombinasi. Bencana kebakaran karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di samping dapat menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat, bencana kebakaran juga dapat mengakibatkan kerugian imaterial bagi kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia merupakan Negara ke-4 dengan penduduk terbanyak di dunia, dan hampir 65% berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri merupakan pusat pemerintahan nasional sehingga kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan kependudukan tersebar di Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tidak merata, tumbuhnya permukiman padat penduduk dan kumuh, sehingga potensi untuk bencana alam seperti banjir atau kebakaran dapat terjadi kapan saja. Banyaknya kejadian kebakaran, baik di kawasan perdagangan, kawasan permukiman, hutan dan kawasan lindung, gedung hotel hingga kantor pemerintahan, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera memperhatikan bahaya kebakaran dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana kebakaran.

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki perkembangan kawasan terbangun sebesar 16% pada tahun 2013. Pembangunan didominasi dengan pengembangan areal pusat-pusat perdagangan, pembangunan ruko, perumahan hingga pusat pemerintahan. Namun dibalik pesatnya perkembangan di Kabupaten Ponorogo sesungguhnya hanyalah merupakan bagian fisik luarnya saja, pembangunan tersebut juga memunculkan dampak negatif seperti menjamurnya permukiman padat dan kumuh, serta perkembangan lain yang tidak sesuai dengan rencana induk pengembangan tata ruang yang ada.

Berdasarkan data jumlah rumah beserta luas permukiman, daerah yang rawan terhadap kebakaran dengan tingkat kerentanan kebakaran yang cukup tinggi, diantaranya Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Jambon, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ngerayun, hal ini disebabkan karena kepadatan penduduk pada kecamatan ini tergolong tinggi, dan kerapatan bangunan pada umumnya rapat.

**Tabel 1.1**  
Jumlah Rumah Beserta Luas Permukiman di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Lahan Permukiman (ha)
1	Ngrayun	146.400	1095,113
2	Slahung	214.990	1658,148
3	Bungkal	97.602	1201,115
4	Sambit	48.800	1217,468
5	Sawoo	195.201	1737,067
6	Sooko	35.860	491,981
7	Pudak	129.401	125,808
8	Pulung	140.640	1290,706
9	Mlarak	97.600	1208,159
10	Siman	115.830	1067,813
11	Jetis	117.440	884,528
12	Balong	94.550	1522,800
13	Kauman	117.440	1178,862
14	Jambon	166.240	1316,724
15	Badegan	97.830	779,710
16	Sampung	97.920	1493,302
17	Sukorejo	146.880	1387,493
18	Ponorogo	27.027	978,310
19	Babadan	166.560	1051,130
20	Jenangan	97.920	1255,586
21	Ngebel	48.960	360,357
<b>Jumlah</b>		<b>2.401.091</b>	<b>23302,181</b>

Sumber : Kabupaten Ponorogo Dalam Angka, 2013

Ketika memasuki musim kemarau antara bulan Februari hingga Agustus dengan suhu yang meningkat, menyebabkan potensi kebakaran di kawasan hutan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo meningkat dan berbanding lurus dengan kekeringan. Kecamatan Ponorogo memiliki kepadatan penduduk tinggi yaitu 33 jiwa/Ha, menyebabkan kawasan tersebut berpotensi menjadi tempat terjadinya kebakaran, sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 terdapat 55 kasus kebakaran yang terjadi di daerah tersebut. Perkembangan kawasan yang begitu cepat dan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai seperti sarana dan prasarana listrik yang tidak teratur, dapat menimbulkan arus pendek yang bisa menjadi potensi kebakaran di wilayah padat permukiman penduduk tersebut. Angka kerugian terbesar akibat bencana kebakaran terjadi pada tahun 2009 yakni Rp 50.000.000.000.000,- terjadi pada kantor pemda Kabupaten Ponorogo, menyebabkan kerusakan terhadap arsip-arsip penting pemerintahan dan properti penting pemerintahan yang memuat data-data penting sehingga kerugian yang terjadi mencapai angka tersebut.

Dalam operasional kegiatan dan pembagian wilayah menyebabkan perlu adanya pengaturan lokasi sistem proteksi kebakaran untuk setiap kegiatan perkotaan secara perwilayahan dan keruangan, berupa Wilayah Manajemen Kebakaran. Rencana Tata Ruang Wilayah ataupun Rencana Detail Tata Ruang merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah-masalah penataan ruang, didalam dokumen tersebut diatur mengenai rencana penggunaan lahan suatu wilayah, menentukan kegiatan sesuai Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah, mengatur kawasan perumahan/permukiman penduduk, kawasan pendidikan, kesehatan, dsb; sehingga masyarakat yang hidup di wilayah tersebut merasa aman dari bahaya bencana dan terpenuhi segala kebutuhannya. Upaya untuk mengurangi potensi kebakaran adalah dengan memuat perkiraan angka rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berisis koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB).

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruh lapisan masyarakat mengingat penanganan terhadap timbulnya bahaya bencana kebakaran masih belum menjadi prioritas utama untuk pembangunan, serta Dinas Kebakaran masih menjadi tumpuan utama masyarakat untuk menangani kebakaran yang terjadi. Cara yang dapat ditempuh adalah melalui penanggulangan secara pasif dan aktif. Bangunan gedung harus terintegrasi secara pasif (perencanaan bangunan dan lingkungan) dan aktif (penyediaan perlengkapan pemadaman) terhadap sistem proteksi kebakaran kota. Penanggulangan bahaya kebakaran dimulai dari "penanggulangan pasif" yaitu sejak dari perencanaan bangunan, lingkungan, infrastruktur kota yang telah mengantisipasi bahaya kebakaran dan pemberdayaan masyarakat. Dilanjutkan dengan "penanggulangan aktif" yaitu penyediaan perlengkapan dan peralatan pemadaman kebakaran dan pelatihan sumberdaya manusia untuk pemadaman kebakaran.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian diatas, adalah sebagai berikut :

- Tingginya tingkat frekuensi dan risiko kebakaran menyebabkan tingginya nilai potensi kerugian yang diderita oleh suatu daerah dan dapat berdampak kepada stabilitas pembangunan daerah tersebut.
- Penyelenggaraan proteksi kebakaran belum mempunyai landasan kebijakan dalam skala pemerintah daerah yang terintegrasi dan dibakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran, dokumen Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang belum dapat memberikan arahan mengenai proteksi kebakaran di suatu wilayah, menyebabkan tingginya resiko yang terpaksa ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya.

- Minimnya sarana dan prasarana proteksi kebakaran di perkotaan
- Minimnya kesadaran masyarakat terkait dengan masalah proteksi kebakaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah bagaimana menentukan Wilayah Manajemen Kebakaran dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam meminimalkan potensi kebakaran di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari studi Aplikasi Wilayah Manajemen Kebakaran dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Meminimalkan Potensi Kebakaran di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur adalah sebagai arahan pengendalian kegiatan proteksi kebakaran berdasarkan pada data kepadatan bangunan sehingga dapat mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah terwujudnya implementasi Wilayah Manajemen Kebakaran dan Intensitas Pemanfaatan Ruang dalam meminimalkan potensi kebakaran.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup terdiri dari pembahasan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Wilayah studi meliputi administrasi Kabupaten Ponorogo, yang mempunyai luas 1.414,092 km<sup>2</sup> yang terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 07° 49' - 08° 20' Lintang Selatan, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.
- Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan.
- Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).

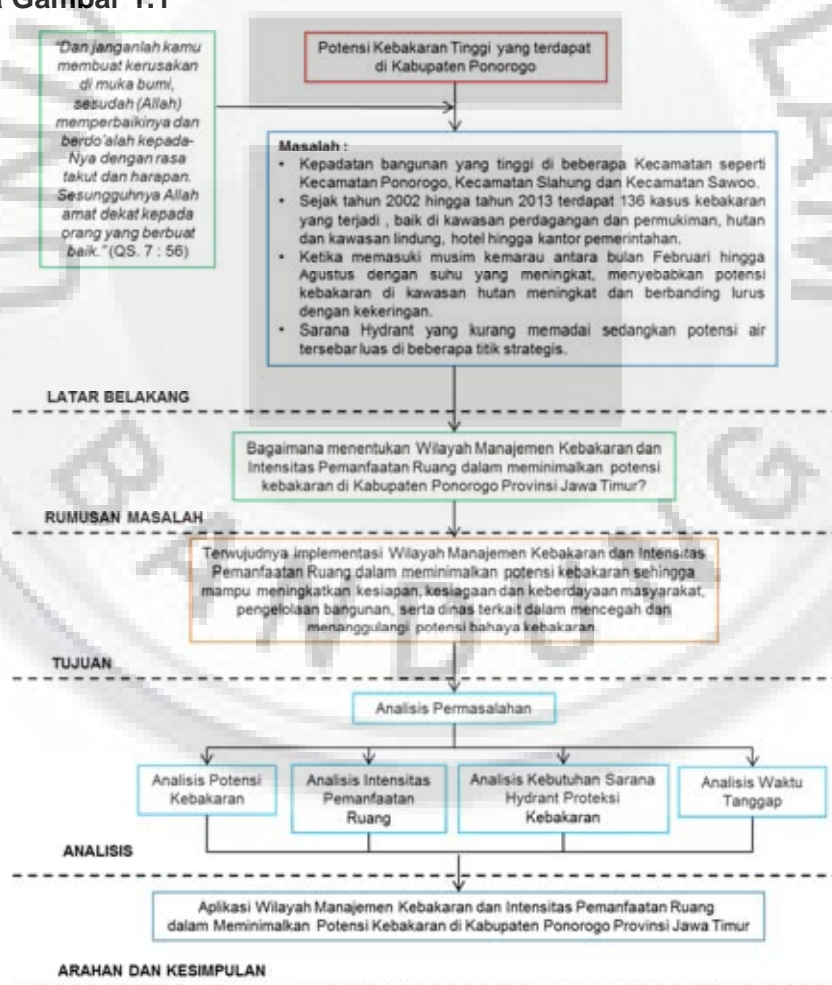


## 1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari studi Aplikasi Rencana Tata Ruang dalam Meminimalkan Potensi Kebakaran di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dibatasi hanya mengenai Wilayah Manajemen Kebakaran dan Fasilitas Hydrant yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penyusunan studi ini diawali oleh latar belakang mengenai isu potensi kebakaran yang muncul dan identifikasi permasalahan penyebabnya, sehingga muncul arahan untuk mengaplikasikan rencana tata ruang dalam meminimalkan potensi kebakaran Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
 Sumber : Hasil Pemikiran Penulis

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penyajian pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat studi, ruang lingkup studi, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Ponorogo, tinjauan kebijakan terkait bencana kebakaran, tinjauan teori wilayah manajemen kebakaran dan mengenai intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa bangunan, juga berisikan definisi operasional.

### **BAB III METODOLOGI**

Pada bab ini berisi mengenai metode - metode yang digunakan dalam melakukan proses penelitian, yang terdiri atas metode pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Bab ini berisi tentang kondisi umum Kabupaten Ponorogo, berupa kondisi kependudukan, kondisi fisik, dan kondisi penggunaan lahan. Didalam bab ini dijelaskan juga mengenai kejadian kebakaran yang terjadi selama 5 tahun terakhir.

### **BAB V ANALISIS**

Bab ini berisi tentang Analisis Permasalahan, Analisis Potensi Kebakaran, Analisis Intensitas Pemanfaatan Ruang, Analisis Kebutuhan Sarana Hydrant Proteksi Kebakaran, dan Analisis Waktu Tanggap.

### **BAB VI ARAHAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN SEBARAN SARANA HYDRANT**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai hasil penarikan kesimpulan dari studi yang dilakukan, kemudian dipaparkan juga arahan dalam hal penanggulangan proteksi kebakaran di Kabupaten Ponorogo.

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah .....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Materi.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
1.6 Sistematika Pembahasan.....	7

